

## Menelisik Nalar Elite : Studi Kasus Pemenangan Pilkada Kaltim 2003-2008

**Guno Tri Tjahjoko**

Jurusan Ilmu Pemerintahan STPM “APMD”

Jl. Timoho No.317, Yogyakarta

Email : gtritjahjoko@gmail.com

### Abstraksi

Dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasangan calon yang bersaing diperhadapkan dengan dua penalaran yang berjalan secara paralel, namun ambivalen. Dalam konteks ini ada dua nalar yang ambivalen, yakni : (1) nalar aktifis yang demokratis dan (2) nalar politisi/ yang pragmatis. Ke dua nalar tersebut bertentangan dalam mempersepsi pemberian – penerimaan, yang oleh para aktifis divonis sebagai tindakan money politics. Sebaliknya para politisi mempersepsi pemberian materi dan non materi sebagai pewujudan silaturahmi dalam masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengungkap bekerjanya dua nalar ambivalen yang melatarbelakangi kemenangan elite politik dalam Pilkada Kaltim. Untuk mengkaji penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data: wawancara, diskusi kelompok, studi literatur dan observasi lapangan (kualitatif). Adapun perspektif studi ini menggunakan paradigma konstruktif (aktor) dalam rangka mengungkap bekerjanya nalar politik dibalik kemenangan elit dalam Pilkada. Temuan penelitian ini menunjukkan elite politik mampu mengelola nalar aktifis dan nalar politisi sebagai keniscayaan untuk memenangkan kontestasi dalam Pilkada. Pengelolaan terhadap dua nalar yang bertentangan tersebut penulis sebut dengan istilah politik ambivalensi. Temuan studi ini menawarkan pemikiran alternatif tentang konseptualisasi politik ambivalensi dalam Pilkada.

Kata-kata kunci : nalar aktifis, nalar politisi, politik ambivalensi

### Abstract

*When elites compete in the elections, then they undoubtedly confront with two perspectives that can not be avoided, namely: (1) normative / idealistic and (2) the pragmatic / contextual. On the one hand they have to portray themselves as a democrat, but on the other hand they have to meet the demands of the community. Those two perspectives are crystallized into a reasoning which runs simultaneously, but ambivalent. In this context, there are two reasons that are ambivalent, namely: (1) The activists/ democratic reasons and (2) political / pragmatic reasons. Both reasons are contrary to the perception of provision - acceptance, which is convicted as an act of money politics by the activists. In contrary, politicians perceive the provision of material and non-material as a realization of the relationship in the community. Purpose this article is about the workings of the two ambivalent reasons that background elites' victory in the elections in East Borneo. To examine this article, the author used data collection methods of interviews, focus group discussions, literature studies and field observations (qualitative). The perspective of this article used constructive paradigm (the actor) in order to reveal the workings of the political reasoning behind the elites' victory in the elections. The findings of this article indicate that elites are capable of managing logical activists and political reasonings as a necessity to win in the election contestation. The*

*management of these two contradictory reasonings is called a political ambivalence by the author. Elites utilize nobility reasonings embodied in patron-client relationships to affect inland, coastal and urban communities. Elites hold social engineering and offer issues of common enemies in order to create a sense of belonging. The findings of this article offer alternative ideas about the conceptualization of political ambivalence in the elections.*

*Key words: activists reasons, political reasons and political ambivalence*

## **Pendahuluan**

Dengan diterapkannya sistem demokrasi di era reformasi, maka berlakulah sistem nilai one man, one vote, one value dalam Pilkada di Indonesia. Prinsip yang mendasari penyelenggaraan Pilkada ini tidak lain adalah apresiasi terhadap hak-hak individual untuk menentukan aspirasi publik. Yang tidak cukup diperhatikan adalah kenyataan bahwa kontestasi yang digelar untuk merayakan hak-hak individual ini dilangsungkan dalam masyarakat yang mengedepankan kolektifitas, termasuk di dalamnya kekerabatan, solidaritas etnis dan sebagainya. Tanpa disadari, ada ketidaksesuaian budaya, yang oleh para pakar politik diabaikan implikasinya. Seolah-olah kontestasi untuk menentukan pemenang dalam Pilkada merupakan satu-satunya cara mewujudkan kedaulatan rakyat.

Implikasi dari penerapan skema yang diatas namakan demokrasi tersebut seakan kedap dari sistem budaya kekerabatan dalam masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia telah hidup dalam sistem budaya kekerabatan selama berabad-abad lamanya, dan oleh karenanya tidak mungkin diabaikan kapasitasnya mementahkan skema yang diberlakukan. Pada kenyataannya pasca sepuluh tahun penerapan skema demokrasi ini tidak menghapuskan nilai-nilai budaya lokal. Bahkan, pemberlakuan skema tersebut dibarengi dengan tidak kunjung matangnya, kalau bukan melemahnya partai politik dalam mengagregasi kepentingan masyarakat.

Elite politik yang akan berkontestasi dalam Pilkada niscaya dihadapkan dengan dua

dinamika, yakni : (1) dinamika lokal, dan (2) dinamika Nasional, khususnya pemberlakuan skema kontestasi untuk demokrasi. Ketika dinamika lokal diselami, Pilkada sebagai skema kontestasi yang berskala Nasional kiranya difahami oleh para kontestan maupun voter dalam konteks lokal masing-masing. Studi ini bermaksud menyelami pemberlakuan skema Nasional di dalam konteks lokal, dan karena pertimbangan-pertimbangan yang nantinya dijelaskan, memfokuskan diri pada bekerjanya nalar elite di balik pemegang Pilkada Kaltim.

## **Kajian Kontestasi antar Elite dalam Pilkada**

Kajian terdahulu tentang kontestasi antar elite dalam Pilkada di Indonesia dilakukan oleh Mukhlis (2009) di kota Sabang. Temuan Mukhlis menunjukkan kemenangan elite politik ditentukan oleh instrumentasi strategi political marketing. Elite memadukan dua strategi sekaligus untuk memengaruhi pemilih di basis massa pesaing. Hasil penelitian Mukhlis (2009) tersebut diperdalam dengan temuan Ismail (2010) yang mengkaji strategi mobilisasi dukungan pemilih di kota Tidore. Temuan Ismail menunjukkan Golkar meraih 24.046 suara (52,76%), sedangkan PKS dan PAN meraih 21.527 suara (47,24%). Strategi pemenangan Golkar di Tidore ditentukan oleh empat mobilisasi, yakni : (1) masyarakat adat, (2) kelompok agama, (3) kelompok paguyuban dan (4) kekerabatan.

Perpaduan strategi ofensif dan defensif dalam pemenangan Pilkada juga dipaparkan oleh Ismardi (2009) yang meneliti tentang pemilihan Walikota di Banda Aceh. Elite menggunakan prinsip-prinsip political marketing, yakni : (1) segmenting, (2) targetting dan (3) positioning.

Sebaliknya Nugraheni (2009) menemukan bahwa kemenangan Rustriningsih ditopang oleh instrumentasi birokrasi yang dikuasainya. Kajian tentang kontestasi antar elite di Kabupaten Paser, Kaltim dilakukan oleh Rasyid (2010). Temuan Rasyid menunjukkan bahwa kemenangan elite ditopang oleh tiga modal, yakni : (1) politik, (2) sosial dan (3) ekonomi. Selaras dengan Rasyid, penelitian tentang instrumentasi etnis dalam pemenangan Pilkada di Kabupaten Buru dilakukan oleh Umasugi (2009), Ramadlan di Kalbar (2008) dan Syarkawi di Kalteng (2007).

Penelitian pemanfaatan sistem nilai budaya lokal dilakukan oleh Haryanto (2013) dalam Pilkada Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat (2010). Temuan Haryanto mengindikasikan adanya pelemahan peran partai politik. Hal ini terjadi karena peran partai tumpang tindih dengan peranan kelompok etnis dalam masyarakat. Temuan Haryanto mengindikasikan adanya politisasi birokrasi dan pemanfaatan tradisi “Kain Timur” yang dikonkretkan dengan pemberian-penerimaan. Otto selaku petahana dan ketua Golkar memberikan posisi strategis dalam pemerintahan kepada suku-suku mayoritas yang ada di Sorong. Selain itu Otto juga memberikan jabatan Kepala Distrik kepada etnis asli. Tampaknya Otto memahami sistem nilai “Kain Timur”, maka putra daerah diberikan posisi yang terhormat. Sebab bagi orang Sorong posisi dalam pemerintahan adalah suatu kebanggaan atau berhubungan dengan martabat suku.

### Metode Penelitian

Fokus artikel ini berusaha menguak bekerjanya nalar elite politik dibalik pemenangan Pilkada Kaltim 2003-2008. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan lima hal, sebagai berikut : *pertama*, penulis menemui anggota tim sukses. Pertemuan penulis dengan tim sukses sebagai salah satu anggota tim sukses di Yogyakarta menjadi pintu untuk penghimpunan data primer

*Kedua*, wawancara dengan elite politik.

Implikasi perkenalan penulis dengan tim sukses, penulis direkomendasikan oleh beliau untuk mewawancarai dengan Gubernur. Oleh karena fokus studi ini tentang menilik bekerjanya nalar elite dibalik pemenangan Pilkada, maka wawancara berkisar sekitar strategi politik, keluarga, latar belakang bangsawan dan instrumentasi jaringan patronase.

*Ketiga*, diskusi kelompok. Untuk memperkaya data primer dan sekunder yang penulis dapatkan di lapangan tersebut, penulis mempertajamnya melalui diskusi kelompok dengan mahasiswa Kaltim (Kutai) yang kuliah di DIY. Masukan dari mahasiswa penulis butuhkan, khususnya untuk melacak penalaran elit dibalik kemenangannya dalam Pilkada.

*Keempat*, studi literatur. Oleh karena studi ini tentang menilik bekerjanya nalar elite dibalik pemenangan Pilkada, maka perlu dicari rujukan teori yang mendasarinya. Langkah yang dilakukan penulis dalam memahami teori demokrasi dan kontestasi antar elite dan patronase.

*Kelima*, observasi lapangan. Selain pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara mendalam, diskusi kelompok dan pelacakan internet – penulis mengadakan observasi ke Kaltim pasca penelitian. Tujuan observasi ke lapangan ialah untuk mengamati kehidupan masyarakat kota dan pedalaman dan mengadakan cek ricek data.

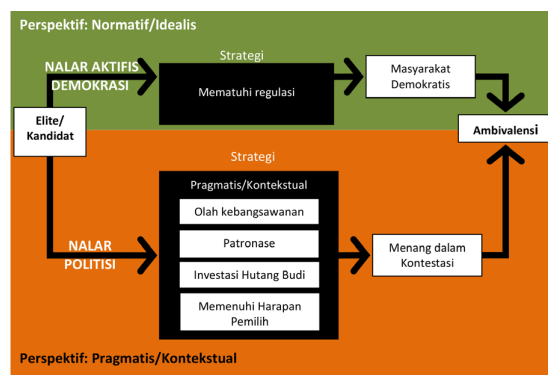
### Kerangka Konseptual

Artikel ini mengacu pada penjelasan Downs, Schroder, Scott dan Wolf perihal kontestasi antar elite yang niscaya berlangsung dan menyerap perhatian dan energi yang menjadi kontestan, dan dalam rangka itu, tidak tertutup kemungkinan elit akan mengurbankan kepatuhan pada kaidah-kaidah berdemokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Flyvbjerg menyarankan agar dalam analisis politik, kita harus bisa membedakan yang ‘real rationality’ dengan ‘real politics’ Dengan mengikuti saran ini kita bisa menganalisis nalar

politik melalui telaah *rationality in action*. Hal yang disebut terakhir inilah yang hendak ditemukan dalam praktek Pilkada selama ini. Dengan *rationality in action* inilah kita bisa memahami apa yang berkecamuk dibalik strategi-strategi yang ditempuh. Pengertian *rationality in action* inilah yang membantu kita memiliki action untuk mewujudkan demokrasi dengan action untuk memenangkan kontestasi. Strategi kemenangan elite dalam Pilkada dengan menginstrumentasi patronase juga dipaparkan oleh Aspinall dan Sukmajati (2015). Aspinall dan Sukmajati mendefinisikan patronase ialah pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya.

Ketika kita menganalisis rasionalitas elite dalam proses berdemokrasi, ternyata ada berbagai tuntutan konsistensi sebagaimana diformulasikan sebagai model klasik rasionalitas yang selama ini kita berlakukan tidak selalu terpenuhi. Belajar dari pemahaman ini, telaah terhadap rasionalitas elite yang disatu sisi dituntut untuk menjadi demokrat, namun di sisi lain dia harus menang dalam kontestasi dengan cara apapun. Hal ini menjadikan pelacakan keruntutan teori dalam standar rasionalitas yang berlaku tidak dapat terpenuhi. Berangkat dari paparan di atas, aktor yang menjadi kontestan Pilkada terikat untuk melakoni dua keharusan sekaligus. Sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 1.1. - dia terikat pada keharusan untuk mematuhi kaidah-kaidah berdemokrasi, dan pada saat yang sama harus memenangkan kontestasi. Dalam Gambar 1.1. tersebut di bawah dipaparkan adanya dua aras yang niscaya dilakoni oleh elit/kandidat dalam kontestasi di Pilkada. Dalam Gambar 1.1.- aras ini ditandai dengan warna yang berbeda, yakni : (1) hijau dan (2) oranye. Aras yang pertama adalah aras normatif atau idealistik (warna hijau), dan yang kedua adalah aras pragmatis atau kontekstual (orange). Dalam studi ini warna hijau menggambarkan area perspektif persemaian nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan oleh para aktifis (Aspinall

**Gambar 1.1. Menelisik Nalar Elite**



dan Sukmajati, 2015). Ketika dia masuk ke aras tersebut, aktor/kontestan niscaya menggunakan perspektif masing-masing. Pada saat yang sama, aktor tersebut juga harus berada di aras praktis dan tidak memiliki pilihan selain pragmatis.

Dalam posisinya di ranah normatif, elite kontestan diharapkan memerankan diri sebagai orang yang taat terhadap nilai-nilai demokrasi, jika bukan memerankan diri sebagai aktifis pro-demokrasi. Elite, dalam posisi ini diasumsikan selalu tunduk, jika tidak memperjuangkan secara konstitusional nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan sebagai pra syarat terwujudnya masyarakat yang demokratis. Demi terimplementasikannya nilai-nilai demokrasi ini elite diharuskan bersaing secara bebas dengan rivalnya, dalam memerebutkan kekuasaan. Hanya saja, caranya mengelola persaingan antar elite dituntut untuk jujur dan adil. Itu semua dibayangkan sebagai bentuk investasi untuk mewujudkan demokrasi melalui keterlibatannya dalam pemerintahan. Dalam posisi seperti ini, aktor/kontestan mengadopsi nalar yang dilabeli sebagai nalar aktifis demokrasi. Dalam jebakan posisi seperti inilah para aktor kontestan terstruktur untuk menjanjikan pemerintahan yang lebih demokratis selama dia memimpin kelak.

Apa yang terjadi ketika aktor berada pada aras pragmatis (warna oranye)? Penalaran macam apa yang menggerakkan tindakan-tindakan aktor kontestan? Ketika berada di aras

ini, aktor harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya berhadapan dengan persaingan ketat. Artinya elit kontestan harus bisa mempersiapkan kemenangan dengan menggunakan strategi terbaik, untuk merebut dukungan masyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, ada empat strategi yang dipakai elite, yakni (1) mengolah posisi dan peran kebangsawanan, (2) patronase, (3) investasi hutang budi dan (4) memenuhi harapan masyarakat (Guno Tri Tjahjoko, 2015). Namun yang urgen untuk dijelaskan di sini bukan detail atau corak strategi itu sendiri, melainkan nalar yang menggerakkan strategi itu sendiri. Yang jelas, dalam posisi ini peran dan kepiawaiannya sebagai politisi sedang dipertaruhkan. Apapun strategi yang diambil, dirinya tidak boleh membiarkan sekedar menjadi nomor dua, karena yang menduduki jabatan Kepala Daerah hanyalah pemenang nomor satu. Artinya, dirinya tidak mungkin main-main atau setengah hati. Sekali memutuskan untuk ikut dalam kontestasi, dirinya haruslah all out. Segala kemungkinan akan ditempuh untuk itu. Dalam konteks ini, nalar yang menuntun perumusan dan keseriusan untuk mengadopsi strategi adalah nalar politisi (Bnd. Aspinal dan Sukmajati, 2015, Ambardi, 2009, Mujani, Liddle dan Ambardi, 2012, Winters, 2011)

Ringkasnya, dalam studi ini elite yang masuk dalam kontestasi kiranya akan sadar bahwa dirinya memasuki ke dua aras tersebut di atas. Pilkada dengan menggunakan dua perspektif yang ambivalen (Guno Tri Tjahjoko, 2015). Elite harus mengemasnya sedemikian rupa dan mencitrakan dirinya sebagai seorang yang demokrat dan bapak pembangunan yang dermawan. Ketika elite memasuki tahapan Pilkada, maka dia akan mencitrakan diri sebagai seorang demokrat dengan mematuhi regulasi yang berlaku.

Sebaliknya ketika dia menghadapi masyarakat secara langsung, maka nalar politisi yang kontekstual yang bekerja. Telaah Pilkada Kaltim yang disajikan dalam naskah ini

nampaknya memperlihatkan gejala yang sama, dimana elite mencampuradukkan dua nalar, yakni : (1) aktifis dan (2) politisi. Pencampuradukan dua nalar yang bertentangan tersebut akan terasa maknanya, jika dikontraskan dengan teori demokrasi dan kontestasi antar elite. Oleh karena itu menjawab permasalahan penelitian tersebut di atas, studi ini mengisyaratkan bahwa elit diperhadapkan dengan dua nalar yang tidak mudah dipilih, dan oleh karenanya memojokkan ke dalam situasi ambivalen,

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Kajian dalam artikel ini memungkinkan kita memahami secara kritis penalaran dibalik gejala yang populer dengan sebutan nalar aktifis dan nalar politisi. Ada dua perspektif yang berjalan secara ambivalen, namun tampaknya dibiarkan begitu saja dan dianggap tidak serius. Sampai pada puncak maraknya money politics dalam setiap Pilkada menjadi kambing hitam (Bnd. Hidayat, 2009). Penyelenggaraan Pilkada divonis sebagai tidak efektif dan pemborosan biaya. Pilkada tidak menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas dan membawa perubahan bagi masyarakat.

Artikel ini dipicu dari permasalahan bagaimana elite mensikapi regulasi dalam Pilkada dan mengelola patronase. Ketika elite diperhadapkan regulasi, maka niscaya dia akan menggunakan nalar aktifis (demokrasi). Kalau hal ini diterapkan secara konsisten, maka akan menghasilkan masyarakat yang demokratis. Namun para aktifis lupa, bahwa pada aras praktis – para politisi diperhadapkan tuntutan untuk menang dalam kontestasi di Pilkada. Bagi mereka regulasi diperlukan, agar dia dapat ikut Pilkada, namun untuk menang regulasi bisa dilanggar.

### **Nalar Politisi: Investasi Hutang Budi**

Pada umumnya masyarakat pedalaman dan pesisir di Kaltim masih sangat menghormati seorang bangsawan. Agar kebangsawanan elite berkharisma di mata mereka, maka elite

menggulirkan program Sekolah gratis 12 tahun. Elite sebagai bangsawan ingin menjawab kebutuhan masyarakat. Program Sekolah gratis 12 tahun ini membidik segmen kelompok menengah ke bawah, sebab jumlah mereka lebih dari 50% penduduk Kaltim (BPS Kalimantan Timur, 2008). Program Sekolah gratis 12 tahun ini hanya merupakan stimuli untuk memengaruhi masyarakat, agar mereka tertarik pada elite. Langkah konkret yang diterapkan elite dalam memengaruhi masyarakat, sebagai berikut :

### **1. Patronase dengan Masyarakat Pedalaman dan Pesisir**

Memperhatikan komposisi persebaran penduduk tersebut, elite tidak memulai sosialisasi Sekolah gratis 12 tahun dari Samarinda atau Kutai Kartanegara. Elite berupaya untuk menguasai 50 % suara penduduk yang berdiam di Kabupaten. Sebagian besar masyarakat Kaltim berdomisili di Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara, namun elite memulai blusukan lebih awal satu tahun dibanding kandidat lain (Wawancara dengan AFI, 2009). Elite mulai menerapkan Sekolah gratis 12 tahun di Kutai Timur. Setelah program ini berhasil, elite blusukan ke Bontang dan Berau. Selanjutnya elite bersafari dan memberikan dana bantuan sosial ke Tarakan, Nunukan, Bulungan dan Malinau. Elite merajut relasi patron-klien dengan cara bertemu langsung tokoh adat, agama dan masyarakat. Elite selaku Ketua Dewan Pendidikan Kaltim mensosialisasikan Sekolah gratis 12 tahun (Wawancara dengan AFI, 2009) dan memberikan bantuan sosial berupa materi dan non materi.

Tampaknya strategi blusukan tersebut secara eksplisit bertujuan untuk menarik simpati masyarakat pedalaman dan pesisir dengan memanfaatkan pemberian materi dan isu Sekolah gratis 12 tahun. Strategi elite tampaknya sangat cerdas, karena dikemas dengan lebel pembangunan dan pemberian materi yang menjawab kebutuhan konkret. Hasil yang diharapkan dari blusukan ke desa -

desa tersebut, mewujudnya citra elite sebagai putra Daerah yang mampu membebaskan masyarakat Kaltim dari kemiskinan dan kebodohan (Guno Tri Tjahjoko, 2015). Tentu masyarakat tanpa curiga menerima kedatangan elite sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kaltim yang menawarkan solusi dan bantuan konkret.

Blusukan elite ke Desa-Desa tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal sosialisasi pra kampanye Pilkada Kaltim (Wawancara dengan AFI, 2009). Dengan elite blusukan ke Desa-Desa, maka dapat diketahui kebutuhan konkret dan penerimaan masyarakat terhadapnya. Tampaknya 80 % masyarakat yang dikunjungi elite merespon positif program Sekolah gratis 12 tahun, seperti yang telah dilakukan di Kutim. Tidak ada kesulitan bagi elite untuk memengaruhi masyarakat dengan isu Sekolah gratis 12 tahun dan bantuan sosial.

### **2. Patronase dengan Ketua Adat**

Tentunya dalam safari ke Desa-Desa tersebut, elite didampingi tim KALIMA untuk bertemu tokoh adat, agama atau masyarakat selama kurun waktu satu tahun (Wawancara dengan AFI, 2009). Tampaknya apa yang dilakukan oleh elite tersebut selaras dengan pandangan Scott (2008). Menurut Scott untuk menginisiasi dan memelihara relasi patron-klien diperlukan tatap muka secara intensif. Tujuan dari pertemuan tatap muka tersebut ialah untuk mengenal lebih dekat elite dan sosialisasi program Sekolah gratis 12 tahun (Scott, 2008). Dalam setiap safari ke Desa-Desa diharapkan terjalin ikatan batin antara elite dengan tokoh masyarakat. Simbolisasi adanya ikatan batin diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial berupa uang dan barang sebagai tanda silaturahmi.

Ada empat sasaran yang dikunjungi oleh elite dalam rangka menjalin relasi dengan tokoh adat atau agama, sebagai berikut : pertama, elite bersafari ke Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Kedua Kabupaten tersebut merupakan Daerah yang terdekat dengan

Kutim, dimana Berau terletak di sebelah Utara, sedangkan Bontang di sebelah Selatan. Oleh karena elite bersafari atas nama Ketua Dewan Pendidikan Kaltim, maka langkah pertama dalam setiap kunjungan dia mendatangi kantor DPRD, Bupati, Dewan Pendidikan Kabupaten dan tokoh adat. Pada saat kunjungan ke DPRD, elite memberikan himbauan agar DPRD membuat kebijakan mengalokasikan anggaran dana APBD sebesar 20 % untuk pendidikan gratis bagi masyarakat. Sedangkan kunjungan ke Bupati dan tokoh adat, isu yang disampaikan elite adalah pentingnya Sekolah gratis selama 12 tahun bagi anak-anak. Hal ini hanya mungkin dilaksanakan, bila elite menjadi Kepala Daerah. Elite memohon dukungan tokoh adat dan para pemimpin daerah atas rencana pencalonannya sebagai Gubernur Kaltim. Untuk mengikat relasi antara tokoh adat dan agama dengan elite, maka KALIMA memberikan materi. Dalam hal ini elite menginvestasikan 'hutang budi' kepada masyarakat. Ketika elite mencalonkan diri dalam Pilkada, relasi patron-klien tersebut berubah menjadi dukungan suara baginya.

### 3. Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Kendala terbesar yang dihadapi oleh elite ialah adanya isolasi geografis masyarakat di Kaltim. Hal ini mengingat kondisi geografis Kaltim sangat unik, dimana Daerah ini sebagian besar pada mulanya dipenuhi dengan hutan. Sebagian daerah di Kaltim berupa perbukitan, dimana pusat pemerintahan dibangun dipinggiran sungai Mahakam. Pada umumnya penduduk Kaltim berdiam di perkotaan, namun masih banyak yang tinggal di pedalaman atau perbatasan yang sulit dijangkau oleh transportasi darat. Dengan memahami komposisi penduduk secara geografis tersebut, maka elite dapat memahami keragaman kebutuhan masyarakat (Wawancara dengan AFI,2009).

Dengan memahami kebutuhan masing-masing daerah, maka elite dapat menawarkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dari paparan kondisi geografis tersebut,

tampaknya masyarakat Kaltim terbagi menjadi tiga kelompok, yakni : *pertama, masyarakat petani atau peladang*. Masyarakat petani atau peladang banyak bermukim di Nunukan, Bulungan, Berau dan daerah transmigrasi di Kutai Kartanegara. Masyarakat petani atau peladang masih menjunjung tinggi tradisi dan kekerabatan. Dengan adanya budaya kekerabatan, maka menjadi lahan yang subur berkembangnya budaya patronase (pemberian).

Kebutuhan utama para petani atau peladang ialah terpenuhinya bibit, pupuk, modal usaha dan penjualan hasil panen. Selain itu mereka membutuhkan perbaikan ekonomi keluarga, khususnya untuk menyekolahkan anak. Pada umumnya anak-anak yang tinggal di pedalaman tidak berpendidikan, karena kurangnya tenaga guru dan sarana pendidikan (Wawancara dengan AFI,2009). Masyarakat petani, peladang atau nelayan sangat terbuka dengan pemberian bantuan. Siapa saja yang memberikan bantuan konkret untuk perbaikan ekonomi akan diterima dan didukung. Oleh karena itu fokus pertama elite memengaruhi massa daerah pinggiran dengan cara memberikan tanah, sertifikat,benih, kemudahan mendapatkan modal dan proteksi hasil panen.

*Kedua, masyarakat perkotaan*. Pada umumnya masyarakat kota berprofesi sebagai pekerja tambang, PNS atau wiraswasta yang tinggal di kota (industri) seperti Tarakan, Bontang, Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Mereka yang tinggal di perkotaan cenderung berpikir rasional, individualistis dan menginginkan pemimpin yang mampu membawa perubahan ekonomi secara konkret. Pada umumnya penduduk kota kurang memperhatikan faktor etnisitas dan agama kandidat. Oleh karena masyarakat kota berpendidikan tinggi, maka kecenderungan mereka berpikir rasional dan kritis. Dalam menentukan sikap terhadap kandidat, mereka lebih banyak dipengaruhi opini media elektronik dan cetak. Oleh karena itu strategi yang diterapkan elite untuk memengaruhi masyarakat

kota ialah dengan merekayasa adanya ‘musuh bersama’. Dengan adanya isu ‘musuh bersama’ diharapkan akan muncul kebutuhan ‘rasa kekitaan’, dimana elite menawarkan diri sebagai problem solvers atas masalah mereka.

### Nalar Aktifis : Dilema Mahar Politik

Oleh karena elite tidak dicalonkan oleh partai politik besar seperti Golkar atau PDI-P, maka elite diperhadapkan dengan dilemma dalam pencalonan sebagai Gubernur. Di satu sisi dia membutuhkan dukungan minimal dan harus membayar ‘mahar politik’ (Marcus, 2013). Namun di sisi lain elite sadar bahwa apa yang dilakukan dengan memberikan ‘mahar politik’ melanggar Undang-Undang. Adapun kekuatan partai politik hasil Pemilu 2004 di Kaltim menempatkan kader Golkar pada posisi pertama dengan 13 kursi di DPRD. Pada posisi kedua ditempati kader PDI-P dengan 7 kursi, PPP memperoleh 6 kursi, PAN memperoleh 5 kursi dan PKS memperoleh 4 kursi. Hasil Pemilu anggota DPRD periode 2004-2009 selengkapnya, sebagai berikut :

**Tabel 1.1.** Kekuatan Partai Politik di DPRD Kaltim 2004-2009

No.	Partai Politik	Periode 2004-2009	Ketua Fraksi
1.	Golkar	13 kursi	Hatta Zainal
2.	Demokrat	2 kursi	Wibowo Handoko
3.	PDI-P	7 kursi	Sudarno
4.	PKS	4 kursi	Zainal Haq
5.	PPP	6 kursi	Kasriyah
6.	PAN	5 kursi	Darlis Pattalangi (PAN-Hanura)
7.	Patriot	2 kursi	Andi Harun (Patriot-PDK-PBB)
8.	PDS	1 kursi	Syaifuddin (PDS-Gerindra)
9.	PDK	1 kursi	
10.	PBB	1 kursi	
11.	Gerindra	Belum ikut Pemilu	
12.	Hanura	Belum ikut Pemilu	
13.	PKB	3 kursi	
	TOTAL	45 kursi	

Sumber : KPUD Kalimantan Timur, 2004

Dari paparan **Tabel 1.1.** tersebut diatas peluang elite dalam candidacy tampaknya tergantung dukungan gabungan partai politik kecil diantaranya PPP, PAN, PDS, Demokrat, PDK, PBB dan PKB. Sebab Golkar, PDI-P dan PKS sudah memiliki kandidat tersendiri. Memang tidak terungkap ke ranah publik berapa uang yang diberikan tim sukses kepada elite partai pendukung, namun transaksi tersebut tersembunyi.

### Keniscayaan Pencampuran Dua Nalar

Memperhatikan situasi dan kondisi yang dilematis, maka elite mencampurkan dua nalar politik menghadapi ketatnya persaingan antar kandidat dalam Pilkada. Nalar aktifis dimanfaatkan oleh elite dalam mensikapi regulasi Pilkada dan proses demokrasi prosedural. Sementara itu nalar politisi bekerja pada ranah praktis yang dijabarkan oleh elit dalam merajut relasi patron-klien. Secara teoritis tidak mungkin elite hanya mengandalkan dukungan gabungan partai kecil untuk menang dalam Pilkada.

Persaingan ketat antar elite dalam Pilkada ditandai dengan saling menyerang dan di beberapa Daerah terjadi black campaign dan money politics (Wawancara dengan Arifin dan Charles, 2009). Untuk pertama kalinya masyarakat Kaltim memilih Kepala Daerah secara langsung yang diadakan tanggal 26 Mei 2008. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada putaran pertama mencapai 67%, jumlah mereka yang Golput mencapai 33 %. Mereka yang Golput sebagian besar adalah kelompok aktivis lingkungan (LSM), cendekiawan dan masyarakat yang rasional. Alasan mereka Golput, karena kecewa terhadap jejak rekam semua kandidat yang tidak berpihak pada kemandirian ekonomi kerakyatan dan menolak eksplorasi tambang yang berdampak merusak lingkungan alam. Mereka berasumsi dana kampanye kandidat berasal dari para investor tambang dan perkebunan yang merusak hutan dan lingkungan di Kaltim (Wawancara dengan



Charles,2011).

Pemilihan Gubernur Kaltim diikuti oleh empat pasang calon, yakni : (1) Achmad Amins-Hadi Mulyadi (PKS,Patriot,PP dan PDK), (2) Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy (PDS, PD, PPP, PB, PM, PBR, dan PAN),(3) Nusyirwan Ismail-Heru Bambang (PDI-P) dan (4) Jusuf Serang Kasim-Luther Kombong (Partai Golkar). Pasangan Amins-Hadi yang diusung oleh PKS dan Patriot merupakan representasi etnis Bugis-Jawa yang merupakan penduduk mayoritas di Samarinda. Sedangkan Awang-Farid merepresentasikan etnis Kutai-Banjar yang merupakan penduduk asli Kaltim. Nusyirwan-Bambang merepresentasikan pemimpin muda Jawa, sedangkan Jusuf-Kombong perpaduan Bugis-Toraja yang merupakan kelompok pendatang di Kaltim yang didukung oleh Syaukani (Golkar). Kandidat yang diusung Golkar dan PDI-P merasa percaya diri akan menang dalam Pilkada 2008, sehingga mereka tidak memerlukan koalisi dengan partai politik lain. Sementara itu dukungan Golkar tidak diberikan kepada kader senior (AFI) yang sudah berpengalaman politik. Demikian juga PDI-P tidak mendukung Yurnalis Ngayoh (etnis Dayak) sebagai kandidat. Oleh karena etnis Dayak tidak terakomodasi dalam Pemilihan Gubernur tersebut, maka suara orang Dayak dan orang Jawa cenderung diberikan ke AFI daripada ke Nusyirwan-Bambang atau Amins-Hadi.

**Tabel 1.2. Hasil Pilkada 2008 Kaltim  
Putaran I**

No.	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	Amins-Hadi (AHAD)	PKS,Patriot,PP dan PDK	396.784 (26,9%)
2.	Awang-Farid (AFI)	PDS, PD, PPP, PKB, PM, PBR, dan PAN	426.325 (28,9%)
3.	Nusyriwan-Heru	PDI-P	280.949 (19,04%)
4.	Jusuf-Kombong	Golkar	371.229 (25,16%)

Sumber : KPUD Kalimantan Timur,2008

Hasil Pilkada putaran pertama tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei LSI (2007) yang memprediksi popularitas dan elektabilitas AFI 27,3%. Sementara itu hasil Pilkada putaran pertama AFI memperoleh suara 426.325 (28,9%). Namun kemenangan AFI pada putaran I tersebut menimbulkan gugatan terhadap KPUD, karena tim AFI menilai KPUD dianggap tidak konsisten dalam menetapkan pemenang Pilkada. KPUD awalnya mengacu UU No.32 Tahun 2004 pasal 107 ayat 2 yang menyatakan pemenang Pilkada minimal memperoleh 25 %. Dengan mengacu UU No.32 Tahun 2004, maka hasil Pilkada tersebut telah dimenangkan oleh AFI. Namun KPUD ternyata menggunakan dasar Undang-Undang No.12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemenang Pilkada harus memperoleh 30 % plus 1. Oleh karena tidak ada pemenang yang memperoleh suara 31 %, maka KPUD menetapkan Pilkada putaran kedua yang akan diikuti oleh Amins-Hadi dan AFI-Farid.

Namun tim sukses AFI tetap ngotot menggugat KPUD-Kaltim ke Mahkamah Konstitusi. Hasil persidangan Mahkamah Konstitusi memutuskan KPUD diwajibkan menyelenggarakan Pilkada putaran ke dua, karena belum ada kandidat yang meraih suara 31 %. Dengan demikian gugatan tim sukses terhadap KPUD kalah dan Pilkada putaran ke dua harus dilaksanakan. Akhirnya putaran Pilkada kedua dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2008 dan hasilnya diumumkan tanggal 7 November 2008. Pada Pilkada putaran kedua ini terjadi penurunan 7 % partisipasi masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam Pilkada mencapai 60 %. Golput mencapai 40 % dan hal ini mengindikasikan adanya kejenuhan masyarakat terhadap proses Pilkada yang lama (5 bulan). Pada putaran kedua ini ke dua pasangan bersaing ketat dan tampaknya dana mereka semakin menipis, sehingga pada putaran ke dua ini bisa disebut sebagai persaingan antar kandidat murni (Wawancara dengan Charles,2011), dimana faktor money politics sedikit merwarnai, namun tidak sebanyak pada putaran pertama. Selain itu masyarakat Kaltim

sudah jenuh terhadap penyelenggaraan Pilkada yang lama dan intrik antar elit politik. Itu sebabnya partisipasi masyarakat pada Pilkada putaran ke dua ini menurun. Adapun hasil Pilkada Kaltim putaran ke dua selengkapnya, sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Hasil Pilkada 2008 Kaltim  
Putaran ke dua**

Kabupaten/Kota	AWANG FAROEK ISHAK FARID WADJDY	ACHMAD AMINS HADI MULYADI
1. Kab Pasir	44.001	29.795
2. Kab Kutai Barat	41.775	16.035
3. Kab Kutai Kartanegara	143.572	82.239
4. Kab Kutai Timur	68.814	24.374
5. Kab Berau	29.906	26.799
6. Kab Malinau	17.551	4.408
7. Kab Bulungan	21.639	15.307
8. Kab Nunukan	25.282	24.490
9. Kab Penajam Paser Utara	25.505	23.962
10. Kota Balikpapan	102.267	83.112
11. Kota Samarinda	158.189	140.451
12. Kota Tarakan	34.906	40.065
13. Kota Bontang	27.317	26.643
Total Suara	740.724 (57,94%)	537.680 (42,06%)

Sumber : KPU Kalimantan Timur, 2008

Memperhatikan perolehan suara AFI pada putaran Pilkada ke dua tersebut, tampaknya AHAD hanya menang di kota Tarakan. Hal ini mengindikasikan pemberian yang dikemas oleh elite dengan rajutan patronase pada tataran akar rumput telah mengakar di seluruh Kabupaten/Kota, kecuali di Kota Tarakan. Tampaknya pendukung Jusuf-Kombong (Golkar) mengalihkan suara kepada Amins yang merupakan kader Golkar. Pasangan AHAD memperoleh 40.065 suara, sedangkan Awang memperoleh 34.906 suara.

Perolehan suara AHAD di Tarakan unggul, karena dukungan konstituen Jusuf-Kombong (Golkar). Namun dukungan Jusuf-Kombong ke AHAD tidak gratis, tentu ada 'transaksi politik' yang tidak terungkap

ke media massa. Persaingan ketat terjadi di Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara yang merupakan basis Golkar, Demokrat dan PDI-P. Tampaknya basis massa AHAD berdomisili di Samarinda, sebab Amins Walikota, sedangkan Hadi adalah tokoh PKS yang populer.

Hasil perolehan suara AHAD di Samarinda berjumlah 140.451, sedangkan AFI memperoleh 158.189. Di kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara perolehan suara antara AFI dan AHAD berselisih di atas 20.000. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh patronase yang dimanfaatkan oleh AFI, khususnya terhadap kelompok pendatang dan etnis Kutai. Tampaknya basis massa PDI-P dan kelompok Jawa cenderung memberikan suaranya kepada AFI. Dukungan kelompok Jawa kepada AFI juga terindikasi dengan adanya pemanfaatan patronase, dimana tim sukses melobi pesangan Nusyirwan-Bambang, agar memberikan dukungan suara kepadanya.

Memperhatikan hasil Pilkada putaran ke dua tersebut, tampaknya patronase sebagai pelumas yang dikemas melalui Ormas KALIMA yang telah bekerja di seluruh Kabupaten/Kota. Demikian juga pemanfaatan adat dan agama efektif dilakukan oleh AFI melalui relasi patron-klien (Wawancara dengan AFI, 2009). Sementara itu basis massa Golkar di Kutai Kartanegara yang terbukti mayoritas mereka memberikan suaranya kepada AFI. Hal ini merupakan implikasi dari inisiasi relasi patron-klien antara AFI dengan elit Kutai. Pada tataran komunitas orang Kutai, kampanye AFI menonjolkan isu politik tentang pentingnya putra Daerah memimpin Kaltim. Sementara itu di kota besar seperti Balikpapan isu kampanye AFI bersifat umum dan terbuka untuk kelompok pendatang dengan isu politik perbaikan ekonomi dan 'Kaltim Untuk Semua' (Wawancara dengan Arifin, 2009).

Kampanye dengan menggunakan isu etnis pun dilakukan oleh AHAD, khususnya di komunitas Bugis atau Makassar yang sangat

fanatik mendukung Amin (Wawancara dengan Arifin, 2009). Walaupun dalam Undang-Undang Pemilu, kampanye dengan isu etnis dilarang, namun pada tataran praktis bagi masyarakat yang bermukim di pedalaman – ternyata isu etnis dan agama sangat efektif memengaruhi perilaku pemilih. Namun AHAD kalah start, sebab AFI telah merajut relasi patron – klien satu tahun sebelum kampanye dimulai. AFI telah merajut jejaring patronase dan memanfaatkan bantuan sosial di desa-desa. Selain itu efektivitas kerja tim sukses dengan memanfaatkan bantuan sosial yang dikemas patronase tersebut berhasil menghantar AFI menang di 12 Kabupaten/Kota. Dalam Pilkada Gubernur 2008 putaran ke dua tersebut AFI memperoleh suara 57,94%, sedangkan AHAD memperoleh 42,06%. Dengan demikian AFI (Kutai) dan Farid Wadjdy (Banjar) menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2008-2013.

### Simpulan

Dibalik kemenangan elite dalam Pilkada Kaltim tersebut di atas telah terjadi bekerjanya dua nalar yang ambivalen, sebagai berikut : *Pertama, nalar politisi*. Untuk memengaruhi masyarakat pedalaman dan pesisir, elite merajut patronase terhadap tokoh adat dan agama. Selain itu elite menjanjikan, jika terpilih sebagai Kepala Daerah dia akan mengatasi masalah masyarakat pedalaman, yakni : (1) isolasi sosial dan geografis, (2) ketimpangan pemilikan tanah, (3) kemiskinan, (4) pendidikan rendah dan (5) penjarahan sumber daya alam. Tujuan akhir dibalik dibalik inisiasi elite merajut patronase dan janji-janji kampanye terhadap tokoh adat dan agama ialah tumbuhnya ikatan batin dan kepercayaan. Ikatan batin dan kepercayaan ini dibutuhkan oleh elite sebagai modal sosial. Ikatan batin tersebut terus dirawat oleh elite dengan pemberian yang berdampak tumbuhnya hutang budi. Dengan adanya hutang budi dalam diri tokoh adat, maka elite dapat memanfaatkan hal ini dalam rangka memobilisasi massa dan

mengkonversi dukungan suara masyarakat terhadapnya.

*Kedua, nalar aktifis*. Elite sebagai kandidat dalam Pilkada harus mentaati regulasi yang berlaku, namun dia juga mencari celah-celah politik untuk memengaruhi perilaku pemilih. Dalam ranah ini pemberian materi dan non materi divonis melanggar regulasi dan ada sanksinya. Oleh karena itu untuk memengaruhi masyarakat kota, strategi politik yang diterapkan elite ialah merekayasa adanya isu musuh bersama (kelompok pendatang). Kelompok pendatang dianggap sebagai penyebab masalah dalam masyarakat, yakni : (1) merosotnya keimanan dan taqwa, (2) kemiskinan, (3) kebodohan, (4) kesehatan dan (5) perusakan sumber daya alam. Dengan adanya isu musuh bersama yang direkayasa tersebut, maka elite mencitrakan dirinya sebagai problem solvers yang digaungkan melalui media cetak dan elektronik.

*Ketiga, pencampuran dua nalar yang ambivalen*. Ketika kontestasi Pilkada (Gubernur) memasuki tahapan kampanye, maka para kandidat berlomba-lomba untuk saling menyerang atau menjatuhkan kredibilitas dan kapabilitas kandidat lainnya. Elite diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit, karena masing-masing kandidat berupaya ingin menang dengan strategi apa saja. elite memanfaatkan kebangsawanannya melalui inisiasi patronase terhadap ketua adat, tokoh masyarakat dan agama. Secara kultural apa yang dilakukan oleh elite sah dan tidak melanggar regulasi yang berlaku. Pemberian dilakukan oleh elite dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Pemberian dilakukan satu tahun sebelum masa kampanye Pilkada dimulai dan sudah lazim dilakukan dalam masyarakat. Namun ketika masa kampanye dimulai, elite memanfaatkan nalar aktifis, dimana penegakan regulasi dan strategi ofensif diterapkan. Strategi ofensif dijabarkan melalui rekayasa sosial, isu musuh bersama, isu rasa kekitaan dan mobilisasi kelompok etnis dan agama.

**Kepustakaan**

- Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel : Studi tentang Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta : Gramedia, 2009
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta : PolGov, 2015
- Brum, Diego Abente dan Diamond, Larry. *Clientelism, Social Policy and The Quality of Democracy*. Baltimore : Johns Hopkins University Prsss, 2014
- Erb, Maribeth dan Sulistiyanto, Priyambudi (ed.), *Deepening Democracy in Indonesia: Direc Elections for Local Leader (Pilkada)*. Singapore : ISEAS, 2008
- Hidyat, Syarif. "Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practice" dalam Maribert Erb and Priyambudi Sulistiyanto (ed.), 2009. *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Election for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS
- Mietzner, Marcus. *Money, Power and Ideology : Political Parties in Post Authoritarian Indonesia*. Singapore : National University of Singapore Press, 2013
- Mujani, Saiful; Liddle, R. William dan Ambardi, Kuskridho. *Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta : Mizan, 2012
- Pratikno, "Political Parties in Pilkada: Some Problems for Democratic Consolidation" in Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto. *Deepening Democracy in Indonesia ?*. Singapore: ISEAS, 2009
- Tri Tjahjoko, Guno . *Politik Ambivalensi : Nalar Elite di Balik Pemenangan*

*Pilkada*. Yogyakarta: PolGov-Fisipol UGM, 2015

Winters, Jeffrey. *Oligarchy*. Cambridge : Cambridge University Press, 2011